

STRICT LIABILITY IN THE FIELD OF TAXATION: Comparison between United States and United Kingdom

Leo B. Barus¹, Ryan S. Alam²

¹Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Email: barusleob@gmail.com

²Universitas Bosowa, Makassar- Indonesia: email: rysalamilmi@gmail.com

Abstract: The prevalence of tax avoidance and tax evasion in the form of tax law loophole abuse, both internationally and nationally, needs to be answered with studies that discuss strict liability arrangements. Based on a comparative study between the United States and the United Kingdom, it is concluded that the handling of tax avoidance and tax evasion in order to save state revenue from the tax sector is adequately carried out by explicitly regulating strict liability in Indonesia. It is hoped that this liability arrangement will provide general benefits to the state in the form of a solution to the problem of rampant violations in the areas of social welfare which carry very high risks and/or the prevalence of certain behaviors in society which in practice must prioritize strict liability rules.

Keywords: *Strict Liability, Tax, Comparison*

A. PENDAHULUAN

Peranan penting Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak di Indonesia belum dapat berjalan dengan maksimal karena masih maraknya *tax avoidance* dan *tax evasion* berupa penyalahgunaan *loophole* hukum tertentu, baik secara internasional maupun nasional.¹ Salah satu alternative untuk meminimalisasi *tax avoidance* dan *tax evasion*, banyak negara telah menerapkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam ketentuan perpajakannya. Studi ini berusaha membandingkan perlakuan pertanggungjawaban mutlak antara Amerika Serikat dan Inggris, sehingga dihasilkan gagasan pertanggungjawaban mutlak di bidang perpajakan di Indonesia.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran *Strict Liability*

Menurut Wallace dan Roberson² dan Jones,³ pertanggungjawaban mutlak merupakan prinsip tanggung jawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan didasarkan pada beberapa alasan seperti untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu untuk kesejahteraan sosial, sulitnya membuktikan *mens rea* (*criminal intent*) dalam pelanggaran terkait kesejahteraan sosial, dan tingginya bahaya sosial yang ditimbulkan pelaku.⁴

Indonesia telah mengatur pertanggungjawaban mutlak dalam ketentuan pidananya. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) mengatur bahwa dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Penjelasan Pasal 37

¹ Henry Dianto P. Sinaga, The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform in Indonesia, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017, pp. 542-557.

² Harvey Wallace dan Cliff Roberson, 2012, *Principles Of Criminal Law*, Pearson Education, New Jersey, hlm. 45.

³ Lucy Jones, 2013, *Introduction to Business Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 344.

⁴ Henry Dianto P. Sinaga, *Ibid*.

UU KUHP menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengandung *strict liability doctrine*, yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya atau pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur Tindak Pidana perbuatan pelaku.

2. Perbandingan *Strict Liability* di Bidang Perpajakan antara Amerika Serikat dan Inggris

Amerika Serikat mengidentikkan *strict liability* sebagai pengenaan sanksi sebesar 20% atas pajak yang kurang disetor terhadap setiap larangan terkait klaim manfaat pajak yang didasarkan atas transaksi yang kurang memenuhi substansi ekonomis sebagaimana diatur dalam Pasal 6662 huruf (a) *juncto* huruf (b) angka (6) *United States Internal Revenue Code* (US IRC).⁵ Sanksi tersebut dapat meningkat menjadi sebesar 40% dalam hal Wajib Pajak sama sekali tidak mengungkapkan transaksi-transaksi yang bersubstansi non-ekonomis (*noneconomic substance transactions*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6662 huruf (i) angka (1) US IRC.⁶ Adapun pengertian *nondisclosed noneconomic substance transactions* berdasarkan Pasal 6662 huruf (i) angka (2) US IRC adalah “*any portion of a transaction described in subsection (b)(6) with respect to which the relevant facts affecting the tax treatment are not adequately disclosed in the return nor in a statement attached to the return*”.

Inggris mengatur *strict liability* dalam *United Kingdom Finance Act 2016* dengan mengenakan hukuman berupa denda dan atau penjara maksimal 51 minggu atas kesalahan dalam melaporkan penghasilan, asset, atau kegiatan-kegiatannya di negara *offshore* sebagaimana diatur dalam Pasal 106B sampai dengan Pasal 106H *United Kingdom Finance Act 2016*, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan di pengadilan bahwa tindakan tersebut berdasarkan *force majeure*. Pasal 106B *United Kingdom Finance Act 2016* mengatur tentang *offence of failing to give notice of being chargeable to tax* dan atau pajak atas *capital gain* pada suatu tahun pajak, kecuali Wajib Pajak tersebut dapat membuktikan bahwa kesalahannya tersebut mempunyai alasan pemaaf.⁷ Pasal 106C *United Kingdom Finance Act 2016* mengatur tentang *offence of failing to deliver return* pada akhir periode yang telah ditentukan, suatu SPT yang dilaporkan akan telah mengungkapkan adanya kewajiban atas PPh dan atau pajak *capital gain* yaitu yang dapat dibebankan pada tahun fiskal atas atau oleh yang berhubungan dengan penghasilan, asset, dan kegiatan-kegiatan *offshore*, dan jumlah PPh dan pajak *capital gain* yang dapat dibebankan pada tahun fiskal atas atau oleh yang berhubungan dengan penghasilan, asset, dan kegiatan-kegiatan *offshore* yang melebihi batas yang telah ditetapkan.⁸ Pasal 106D *United Kingdom Finance Act 2016* mengatur tentang pelanggaran dalam mengisi SPT yang isinya tidak benar (*offence of making inaccurate return*) yang menyebabkan meningkatnya jumlah PPh atau pajak *capital gain* yang lebih besar yaitu yang dapat dibebankan pada tahun fiskal atas atau oleh yang berhubungan dengan penghasilan, asset, dan kegiatan-kegiatan *offshore*, dan jumlah kenaikan tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan, kecuali orang yang diduga melanggar tersebut dapat membuktikan telah melakukan kehati-hatian yang layak/patut dalam pelaporan SPT tersebut.⁹ Pasal 106E *United Kingdom Finance Act 2016* mengatur tentang pengecualian-pengecualian dari pelanggaran Pasal 106B sampai dengan

⁵Legal Information Institute of Cornell Law School, 26 U.S. Code § 6662 - Imposition of accuracy-related penalty on underpayments, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6662>>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

⁶Legal Information Institute of Cornell Law School, 26 U.S. Code § 6662 - Imposition of accuracy-related penalty on underpayments, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6662>>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

⁷The United Kingdom, Finance (No. 2) Bill, <<https://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2015-2016/0155/160155.pdf>>, diakses tanggal 1 Juni 2017.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Pasal 106D *United Kingdom Finance Act 2016 (exclusions from offences under sections 106B to 106D)*.¹⁰ Pasal 106F mengatur tentang ketentuan tambahan pelanggaran Pasal 106B sampai dengan Pasal 106D *United Kingdom Finance Act 2016 (offences under sections 106B to 106D: supplementary provision)* seperti adanya perpanjangan waktu, adanya pemberian wewenang mengatur kepada Departemen Keuangan (*The Treasury*) dalam hal jumlah tertentu sepanjang yang tidak melebihi £25.000,- terkait jumlah pajak atas atau oleh yang berhubungan dengan penghasilan, asset, dan kegiatan-kegiatan *offshore* dimana kenaikan jumlah pajak tersebut berasal dari jumlah koreksi atas ketidak benaran. Kemudian dalam Pasal 106F *United Kingdom Finance Act 2016* menegaskan definisi penghasilan, asset, dan kegiatan *offshore* sebagai: “(a) *income arising from a source in a territory outside the United Kingdom, (b) assets situated or held in a territory outside the United Kingdom, or (c) activities carried on wholly or mainly in a territory outside the United Kingdom. (5) In subsection (4), “assets” has the meaning given in section 21(1) of the 1992 Act, but also includes sterling.*”¹¹ Pasal 106G mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran Pasal 106B sampai dengan Pasal 106D *United Kingdom Finance Act 2016*.¹² Dan Pasal 106H mengatur tentang tata cara regulasi Pasal 106E dan Pasal 106F *United Kingdom Finance Act 2016 (Regulations under sections 106E and 106F)* yang memperkenankan perbedaan perlakuan untuk kasus yang berbeda namun harus tetap dibuat oleh instrumen peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.¹³

C. KESIMPULAN

D.

Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan kekayaan negara, diharapkan terdapat secara eksplisit pengaturan pertanggungjawaban mutlak di bidang perpajakan di Indonesia karena dapat memberikan kemanfaatan umum bagi negara berupa solusi atas permasalahan terhadap maraknya pelanggaran di bidang-bidang kesejahteraan masyarakat yang mengandung risiko yang sangat tinggi dan atau maraknya perilaku tertentu dalam masyarakat yang pada pelaksanaannya harus lebih mengutamakan *strict liability rules* sebagaimana telah diterapkan oleh beberapa Negara dengan sangat baik dalam ketentuan perpajakannya seperti negara Amerika Serikat dan Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Jones, Lucy, *Introduction to Business Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013.
- Legal Information Institute of Cornell Law School, *26 U.S. Code § 6662 - Imposition of accuracy-related penalty on underpayments*, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6662>>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.
- Legal Information Institute of Cornell Law School, *26 U.S. Code § 6662 - Imposition of accuracy-related penalty on underpayments*, <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26/6662>>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.
- Sinaga, Henry Dianto P., *The Criminal Liability of Corporate Taxpayer in the Perspective of Tax Law Reform in Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2017, pp. 542-557.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

The United Kingdom, Finance (No. 2) Bill,
<<https://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2015-2016/0155/160155.pdf>>, diakses tanggal 1 Juni 2022.

Wallace, Harvey, dan Roberson, Cliff, 2012, *Principles Of Criminal Law*, Pearson Education, New Jersey.